

## PERMASALAHAN PEMBIAYAAN DI PERGURUAN TINGGI (UKT) DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI KEBUTUHAN TERSIER TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI S1 DI PASAR TENAGA KERJA

Rieke Septyan Ayusla<sup>1</sup>, Sajida Salwa Sholikhah<sup>2</sup>, Savina Dina Saputri<sup>3</sup>, Tiara Insan Salamah<sup>4</sup>, Zulfa Nabilah Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sebelas Maret

Email: [riekeayusla25@gmail.com](mailto:riekeayusla25@gmail.com)<sup>1</sup>, [salwasajida557@gmail.com](mailto:salwasajida557@gmail.com)<sup>2</sup>, [savinadina20@gmail.com](mailto:savinadina20@gmail.com)<sup>3</sup>, [tiarainsan03@gmail.com](mailto:tiarainsan03@gmail.com)<sup>4</sup>, [zulfanabilahr@gmail.com](mailto:zulfanabilahr@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait pembiayaan, khususnya melalui biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang menjadi perdebatan utama dalam aksesibilitas pendidikan tinggi. Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk menginvestigasi dampak permasalahan pembiayaan UKT dan pandangan bahwa pendidikan tinggi hanya sebagai kebutuhan tersier terhadap standar kualifikasi di pasar tenaga kerja. Ditemukan bahwa peningkatan biaya UKT telah menyulitkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, mempengaruhi pilihan karir serta kualifikasi pekerja di pasar kerja. Permasalahan ini diperparah dengan persepsi bahwa pendidikan tinggi bukan kebutuhan utama, yang mengurangi prioritas masyarakat terhadap investasi dalam pendidikan dan keterampilan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan peningkatan pengangguran merupakan dampak dari ketidaksesuaian antara kualifikasi yang diminta oleh pasar kerja dengan aksesibilitas pendidikan tinggi yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, artikel ini merekomendasikan peningkatan akses melalui beasiswa, dukungan finansial, dan reformasi sistem pendanaan UKT. Selain itu, edukasi dan pelatihan tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai investasi dalam pendidikan tinggi.

**Kata Kunci :** Pembiayaan Pendidikan, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kebutuhan Tersier, Pasar Tenaga Kerja, Studi Literatur

### Abstract

*Higher education in Indonesia faces significant challenges related to financing, particularly through the Single Tuition Fee (UKT), which has become a major debate in the accessibility of higher education. This article uses a literature review method to investigate the impact of UKT financing issues and the view of higher education as a tertiary necessity on qualification standards in the labor market. It is found that the increasing cost of UKT has made access to higher education difficult for the middle and lower economic groups, affecting career choices and the qualifications of workers in the labor market. This problem is compounded by the perception that higher education is not a primary need, which reduces people's prioritization of investment in education and necessary skills. The results show that social inequality and rising unemployment are the result of a mismatch between the qualifications demanded by the job market and the limited accessibility of higher*

*education. To address this issue, this article recommends increasing access through scholarships, financial support, and reforming the UKT funding system. In addition, education and training on the importance of education and skills are expected to increase public awareness of the value of investing in higher education.*

**Keywords :** *Education Financing, Single Tuition Fee (UKT), Tertiary Needs, Labor Market, Literature Study*

## A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi dengan Pendidikan tinggi memiliki arti yang berbeda. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah sekolah menengah atas seperti program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diadakan oleh perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti universitas, akademi, dan politeknik. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, namun memiliki makna dan fokus yang berbeda (Fauzi dkk, 2020, hlm. 417).

Pendidikan tinggi memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun di Indonesia, kualitas perguruan masih rendah jika dibandingkan dengan Negara lain. Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan tinggi, sebagai contoh adalah pembiayaan pendidikan tinggi. Pada dasarnya pembiayaan pendidikan tinggi didasarkan pada kemampuan orang tua dalam membayarnya. Namun, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan baru seperti yang terjadi belakangan ini. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Unsoed naik sebesar 100% yang menimbulkan banyak calon mahasiswa mengundurkan diri. Setelah dilakukannya evaluasi, pihak Unsoed hanya menaikkan 18% dari UKT tahun sebelumnya.

Standar kualifikasi S1 mengacu pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa S1. Pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi kunci untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan standar kualifikasi S1 yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja (Lafendry, 2020, hlm. 2). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perguruan tinggi yang benar-benar mampu menyediakan pembelajaran dan juga kegiatan yang bertujuan untuk mengasah softskill dan hardskill yang relevan dengan dunia kerja kelak.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier. Statement tersebut berarti bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan pilihan dan tidak wajib. Wajib belajar yang

berlaku di Indonesia 12 tahun sebagai program lanjutan dari 9 tahun sebelumnya atau sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat (Margiyanti & Maulia, 2023, hlm. 201). Namun pada dunia kerja memberikan standar kualifikasi yang cukup tinggi terhadap fresh graduate. Gelar S1 bukan lagi hanya sekadar keinginan, melainkan suatu keharusan yang dimiliki untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Standar kualifikasi S1 menjadi prasyarat minimal yang dipandang penting oleh banyak perusahaan dalam proses penerimaan karyawan baru.

Berdasarkan uraian diatas, akan dibahas berbagai permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi, serta bagaimana pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier mempengaruhi standar kualifikasi S1 di pasar tenaga kerja. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh calon mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi dalam konteks ekonomi dan sosial saat ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur memberikan peneliti landasan teoritis yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan permasalahan. Literatur yang menjadi referensi dalam metode ini adalah pengetahuan mengenai riset yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya. Nantinya hasil yang didapat akan digunakan untuk mendalami fenomena dan menghubungkan hasil penelitian dari berbagai sumber. Keterkaitan antara hasil penelitian akan dirangkai secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan beragam data dalam studi ini memperoleh beragam dari jurnal, buku, berita, ataupun sumber bacaan lainnya. Dengan demikian, metode studi literatur adalah pilihan yang tepat karena mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait isu-isu kompleks yang dibahas serta menyediakan landasan yang kuat untuk menyusun rekomendasi kebijakan atau praktik lebih lanjut di bidang pendidikan tinggi dan pembiayaan pendidikan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Pembiayaan UKT terhadap Kualifikasi S1 di Perguruan Tinggi**

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah bagian dari biaya pendidikan tunggal yang dibayarkan setiap mahasiswa sesuai dengan kemampuan keuangannya. Besaran UKT ini

bervariasi antar prodi dan fakultas, karena bergantung pada penghasilan orang tua dan biaya lain yang menjadi tanggung jawabnya. UKT meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan keluarga yang semakin rendah (Kurniawati, Gresela, Alisyahbana, Arisah, & Hasan, 2021, hlm 612). Secara umum, UKT memiliki tujuh kelompok yaitu kelompok UKT 1 (satu) hingga kelompok UKT 7 (tujuh) dengan nominal yang bervariasi (Aviani, & Hidayat, 2020, hlm. 102). Setiap perguruan tinggi biasanya memiliki cara mereka menghitung UKT. Ada perguruan tinggi yang memakai metode WASPAS, decision tree, maupun random forest.

Belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengeluarkan pernyataan terkait kenaikan UKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 yang hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Hal ini tentu memicu perbincangan hangat di masyarakat. Meski ada pernyataan bahwa kenaikan UKT tidak akan banyak berdampak pada siswa dari keluarga kurang mampu, namun bagi orang tua yang anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi, kenaikan UKT ini tetap saja sangat meresahkan. (Aditya, 2024)

Besarnya biaya UKT ini juga menyebabkan permasalahan di pasar kerja. Banyak lowongan pekerjaan yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1, sedangkan banyak orang yang sulit untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena masalah ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada kualitas lulusan S1 di perguruan tinggi, dimana tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar biaya pendidikan yang tinggi. Ada juga yang membuat lowongan pekerjaan yang dengan kualifikasi pendidikan S1 namun diberi upah yang tidak sesuai dengan pendidikan tersebut.

Kualifikasi S1 ini memang sangat berperan dalam pendidikan seseorang untuk meningkatkan kualitas dan membuka prospek karir yang lebih baik di kemudian hari. Namun pencapaian UKT yang tinggi dapat menghambat banyak siswa dalam mengejar pendidikan. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan (Kurniawati, 2022, hlm. 7). Hal ini tentunya akan melemahkan rendahnya kualifikasi sarjana di Indonesia, suatu pukulan yang dapat menghambat daya saing kita di kancah global. Intinya, meskipun bukan obat mujarab untuk setiap penyakit, memperoleh gelar sarjana tetap merupakan elemen penting dalam pengembangan pribadi dan kesuksesan masa depan yang harus dapat diakses oleh semua orang yang mencarinya terlepas dari hambatan finansial.

Tidak hanya itu, kualitas pembelajaran juga dapat dipengaruhi oleh kendala pendanaan UKT. Siswa yang sudah mengalami stres akademik mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar jika tingginya biaya UKT membuat mereka mengambil pekerjaan paruh waktu atau berhenti sekolah. Kehilangan konsentrasi akibat beban keuangan ini tentu akan mengganggu fokus studi mereka, sehingga menurunkan kualitas pendidikan yang mereka terima; Hal ini akan mengganggu perhatian dan fokus mereka dalam belajar.

Penting bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah pembiayaan UKT untuk memitigasi hambatan kualifikasi sarjana. Beban keuangan UKT dapat dikurangi jika pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, universitas juga perlu memperbaiki pengelolaan keuangannya sehingga biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa akan lebih rendah. Sebaliknya, adalah bijaksana bagi siswa untuk mencari informasi tentang beasiswa dan program bantuan keuangan lainnya yang dapat membantu mereka membiayai pendidikan mereka.

## **Permasalahan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier terhadap Standar Kualifikasi S1 di Pasar Tenaga Kerja**

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang diemban setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma III/diploma IV, sarjana/strata I, magister/strata II, spesialis, dan program doktor/strata III yang diselenggarakan dalam suatu perguruan tinggi. Tujuan diadakannya pendidikan tinggi ialah untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan undang-undang dan juga menghasilkan lulusan yang menguasai cabang IPTEK serta meningkatkan daya saing bangsa melalui penelitian yang mencermati nilai-nilai kemanusiaan agar dapat memberikan kebermanfaatn untuk bangsa (Simatupang & Yuhertiana, 2021, hlm. 34).

Hakikat pendidikan yang mengandung nilai kemanusiaan sesuai tujuan pendidikan tingkat tinggi yang telah disinggung sebelumnya, menghadapi tantangan tersendiri di zaman yang berubah-ubah saat ini. Permasalahan seperti penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi mulai dari uang kuliah tunggal yang semakin mahal, iuran pengembangan institusi semakin naik per golongannya, hingga printilan-printilan kebutuhan kuliah lain banyak memberatkan segelintir masyarakat. Sejatinya, sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara ialah pendidikan yang layak yang ditanggung dan diatur oleh pemerintah negara. Akan tetapi, dengan kebijakan yang berubah-ubah terkesan tidak memihak golongan

menengah kebawah yang sedang bertahan ditengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan golongan menengah keatas yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan mendasar hingga kebutuhan tersier yang identik dengan kemewahan (Muhid & Putra, 2021, hlm. 91).

Pendidikan sejatinya adalah kebutuhan mendasar seorang manusia. Namun, baru-baru ini sebuah statement dari seorang pejabat tinggi kemendikbud ristek menyebutkan bahwa kuliah/pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier yang hanya bisa dicapai oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Statement tersebut tentu dibalas cepat oleh masyarakat dengan kritikan. Bagaimana tidak, jika pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan tersier maka bisa jadi orang-orang menempuh pendidikan tinggi hanya karena menganggap kuliah adalah gaya hidup atau agar terlihat lebih “keren” (Selamat, 2024).

Isu pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan tersier nampaknya juga pernah muncul pada masa orde baru. Pada masa itu, Indonesia harus melakukan perdagangan bebas dengan berlandaskan aliran liberal. Dampaknya, pada sektor pendidikan dijadikan ladang usaha yang dianggap penting, yaitu termasuk golongan kebutuhan tersier. Pendidikan yang dijadikan sebagai kemewahan tersebut memiliki empat program khusus bagi pendidikan tinggi, yakni program pendidikan tinggi luar negeri dengan pembelajaran jarak jauh (online program), pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri (consumption abroad), membangun perguruan tinggi luar negeri di dalam negeri (commercial presence), dan pengajaran yang dilakukan oleh dosen/lecturer asing di dalam negeri (presence of natural person) (Muhid & Putra, 2021, hlm. 92). Program-program khusus pada pendidikan tinggi tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan hanya dapat dicapai oleh golongan menengah keatas. Oleh karena itu, pada masa tersebut pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan tersier. Akibatnya, dunia pendidikan mulai berorientasi pada laba, pemasukan, untung dan bisnis yang dapat dikapitalisasi (Muhid & Putra, 2021, hlm. 96).

Pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier melemahkan angan-angan orang yang ingin mengejar gelar sarjana di perguruan tinggi. Orang-orang dengan latar belakang finansial yang baik atau termasuk golongan menengah keatas berkemungkinan tinggi mendapatkan gelar S1 dengan mudah ketimbang orang-orang dengan latar belakang finansial yang rendah. Padahal, yang dicari di perguruan tinggi adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh individu untuk bekal mencari pekerjaan. Kompetensi lulusan pendidikan tinggi seperti S1 yakni menghasilkan lulusan yang menguasai cabang IPTEK serta meningkatkan daya saing bangsa melalui

penelitian yang mencermati nilai-nilai kemanusiaan agar dapat memberikan kebermanfaatan untuk bangsa (Simatupang & Yuhertiana, 2021, hlm. 34).

Dalam hal mencari pekerjaan, perusahaan akan memilih tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi, sumber daya manusia yang berlatar belakang bagus pada kemampuan berpikir (intelegensi) dan critical thinking, berkemampuan baik dalam menggali dan mengaplikasikan informasi, berinisiatif tinggi, kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan, serta kemampuan bekerja baik individu maupun kelompok (Ananta dalam Marpaung, 2015, hlm. 4). Disamping itu, perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang mampu menguasai perkembangan teknologi dengan bakat manajerialnya.

Kualifikasi tenaga kerja yang berkualitas tersebut notabene ditemukan pada lulusan sarjana yang telah mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, individu yang memperoleh gelar sarjana akan memiliki kualifikasi yang jauh lebih baik dibanding mereka yang tidak mampu memperoleh gelar yang serupa. Dalam hal ini, seseorang harus menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi dengan pengorbanan biaya, tenaga dan waktu yang tidak seberapa. Oleh karena itu sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama akan kemudahan akses terhadap pendidikan tinggi bagi seluruh warga negara dengan mengesampingkan kepuasan/kemewahan individu.

## **Permasalahan Pembiayaan UKT dan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier terhadap Standar Kualifikasi S1 di Pasar Tenaga Kerja**

Permasalah pembiayaan UKT dan statement mengenai pendidikan tinggi hanya sebagai kebutuhan tersier memiliki implikasi terhadap standar kualifikasi S1 di pasar tenaga kerja. Permasalahan UKT pada saat ini menjadi pembicaraan yang hangat karena adanya peningkatan biaya UKT di beberapa Universitas di Indonesia. Tingginya biaya UKT jelas memberatkan bagi keluarga yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses pendidikan tinggi bagi beberapa kelompok masyarakat. Mereka memutuskan untuk langsung bekerja dibandingkan dengan menempuh perguruan tinggi.

Sedangkan disisi lain, pasar tenaga kerja pada saat ini memiliki kualifikasi dalam menawarkan tenaga kerja dengan menetapkan pendidikan pelamar kerja minimal memiliki gelar S1. Akan tetapi, tingginya biaya UKT di perguruan tinggi menjadi permasalahan bagi masyarakat dari ekonomi menengah kebawah dalam melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar S1. Sehingga pelamar kerja yang dari lulusan SMA/SMK/ sederajat tidak dapat

memenuhi kualifikasi perusahaan yang mengakibatkan tidak diterimanya di perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan terjadinya peningkatan pengangguran.

Permasalahan ini semakin rumit dengan adanya anggapan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Tentunya dengan adanya statement tersebut memunculkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat yang menyetujui dengan statement tersebut lebih memilih untuk langsung bekerja karena ketidaksanggupannya dalam membiayai pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, munculnya statement tersebut memperkuat pandangan negatif terhadap pentingnya perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak memiliki gelar S1. Sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tidak memiliki gelar S1 untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan karena keterbatasan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan.

Penetapan kualifikasi minimal pendidikan S1 jelas memberikan dampak negatif bagi pelamar kerja lulusan SMA/SMK/Sederajat. Walaupun pelamar tanpa gelar S1 memiliki pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang baik, mungkin saja pelamar tanpa gelar S1 banyak mengalami kehilangan peluang bekerja. Masih banyak pendapat mengenai pelamar lulusan SMA/SMK/Sederajat kurang berkompeten serta belum siap untuk berada dilingkup kerja dibandingkan dengan lulusan S1. keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMA/SMK/Sederajat yang telah diajarkan oleh sekolah belum tentu dapat memenuhi kebutuhan industri yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Selain itu, saat ini jumlah pelamar kerja yang telah menempuh pendidikan S1 sudah sangat banyak. Sehingga pasar tenaga kerja akan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengatasi kedua penyebab masalah tersebut dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi melalui beasiswa, dukungan finansial, dan peninjauan sistem pendanaan UKT untuk membantu meringankan biaya pendidikan. pemerintah juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan keterampilan, Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan di dunia kerja.

## D. KESIMPULAN

Permasalahan pembiayaan UKT dan implikasi *statement* bahwa pendidikan tinggi hanya sebagai kebutuhan tersier menjadi hal yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Peningkatan biaya UKT di perguruan tinggi telah menghambat

akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, memaksa sebagian dari mereka untuk langsung memasuki pasar kerja tanpa gelar S1. Di sisi lain, pasar kerja mengharuskan kualifikasi minimal S1, yang membuat mereka tanpa gelar ini sulit bersaing. *Statement* bahwa pendidikan tinggi hanya sebagai kebutuhan tersier menambah kompleksitas, karena hal ini mengurangi prioritas masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dampaknya adalah terjadinya kesenjangan sosial dan peningkatan pengangguran, karena banyak yang tidak memenuhi syarat kualifikasi untuk pekerjaan yang tersedia. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi melalui beasiswa dan dukungan finansial, serta peninjauan sistem pendanaan UKT untuk meringankan beban biaya pendidikan. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan di pasar kerja, sehingga dapat meminimalkan kesenjangan kualifikasi dan mengurangi pengangguran. Dengan tindakan-tindakan ini, diharapkan dapat diciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi dan mengakses peluang kerja yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R. (2024). Nadiem tegaskan kenaikan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa baru. *Kompas*. Diperoleh 15 Juni 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/21/11311891/nadiem-tegaskan-kenaikan-ukt-hanya-berlaku-bagi-mahasiswa-baru>.
- Aviani, T. H. B., & Hidayat, A. T. (2020). Sistem pendukung keputusan seleksi pemberian uang kuliah tunggal menerapkan metode WASPAS. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 2(1). 102-109.
- Devita Safitri. (2024, 21 Mei). Sempat diprotes kemahalan, Unsoed: kenaikan UKT 18%, tak terlalu tinggi. *Detikedu*. Diperoleh 14 Juni 2024, dari <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7351237/sempat-diprotes-kemahalan-unsoed-kenaikan-ukt-18-tak-terlalu-tinggi/amp#>
- Fauzi, H., Aprianto, I., Amiruddin, A., & Zulqarnain, Z. (2020). Strategi pengembangan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(5), 416-424.

- Kurniawati, Gresela, J., Alisyahbana, A. N. Q. A., Arisah, N., & Hasan, M. (2021). Persepsi mahasiswa terhadap implementasi uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian*. 612-619.
- Kurniawati. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 13(1). 1-13.
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 3(3), 1-16.
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan pendidikan implementasi program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 199-208.
- Marpaung, H. (2015). Determinasi tenaga kerja terdidik bekerja sebagai karyawan (studi kasus lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau tahun 2010). *Jurnal Fekon*, 2(2), 1-11.
- Muhid, A., & Putra, IOL (2021). Kapitalisasi pendidikan dan aksesibilitas pembelajaran. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 14(1), 89-103.
- Selamat, F. (2024, 31 Mei). Pendidikan tinggi yang bersifat tersier. *Kompas*. Diperoleh 13 Juni 2024, dari <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/31/080000571/pendidikan-tinggi-yang-bersifat-tersier?page=all>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka belajar kampus merdeka terhadap perubahan paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 2(2), 30-38.